SENTRI:
Jurnal Riset Ilmiah
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 4, No. 12, 2025
e-ISSN: 2963-1130
pp. 3843-3854

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka

Sudarmawan[1*], Wahyu Hidayat[1]
[1]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Institut Pahlawan 12

*Corresponding Author's e-mail: wawansudarmawan27@gmail.com

Article History:
Received: November 28, 2025
Revised: December 12, 2025
Accepted: December 25, 2025

Keywords:
Community_Empowerment, Development, Ecotourism, Local_Wisdom, Sustainability

Abstract: *This study analyzes community empowerment through the development of ecotourism based on local wisdom in Tuing Hamlet. The novelty of this research lies in its integrative examination of social, institutional, and governance dimensions of ecotourism-based empowerment at the hamlet level, emphasizing local wisdom as both a cultural asset and a participatory governance mechanism. The study addresses three research questions: (1) what natural and cultural potentials support ecotourism development in Tuing Hamlet, (2) how local wisdom is mobilized in community empowerment processes, and (3) what structural challenges constrain empowerment outcomes. A qualitative approach was employed using observation, in-depth interviews, and document analysis. Data were analyzed through thematic analysis, involving data reduction, coding, categorization, and interpretation to identify key patterns of empowerment and existing constraints. The findings indicate that Tuing Hamlet possesses significant potential for ecotourism development, supported by the establishment of the* Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulau Punggur *as a formal management institution and active participation of community groups, including youth, traditional leaders, and women's organizations (PKK), in decision-making processes. This participation has fostered an emerging sense of community agency. However, empowerment remains at an early stage due to several challenges: limited access to financial resources caused by dependence on a single investor and the absence of government support, restricted access to knowledge and training, weak and non-transparent governance resulting from the lack of binding technical regulations, and the absence of direct economic benefits as ecotourism activities are not yet fully operational. These findings imply that sustainable ecotourism-based community empowerment requires structural strengthening through diversified funding sources, continuous capacity building, inclusive partnerships, and transparent internal governance mechanisms.*

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Sudarmawan, S., & Hidayat, W. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(12), 3843–3854. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5096

PENDAHULUAN

Dusun Tuing di Desa Mapur, Kabupaten Bangka, memiliki potensi ekowisata yang signifikan yang bersumber dari kekayaan alam pesisir dan kearifan lokal masyarakat setempat. Potensi tersebut meliputi aktivitas wisata bahari seperti snorkeling di kawasan

terumbu karang yang membentang sepanjang perairan Tuing, mulai dari Pantai Pulau Punggur hingga Sungai Tengkalat [1]. Selain kekayaan alamnya, Desa Mapur merupakan desa inklusif yang dihuni oleh masyarakat Suku Lom, salah satu suku tertua di Kepulauan Bangka Belitung, yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya, pengetahuan lokal, dan relasi harmonis dengan alam sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Kombinasi antara sumber daya alam dan budaya ini menjadikan Dusun Tuing sebagai lokasi yang strategis untuk pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal.

Namun demikian, pengembangan pariwisata di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Sejumlah inisiatif pariwisata cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian budaya, sehingga berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan serta erosi identitas lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pariwisata masih relatif terbatas, yang berdampak pada rendahnya rasa kepemilikan dan dukungan sosial terhadap program pengembangan pariwisata [2]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekowisata yang dimiliki dan kapasitas pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelolanya secara berkelanjutan.

Secara akademik, kajian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di tingkat dusun, khususnya pada komunitas adat seperti Suku Lom, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek ekonomi atau promosi pariwisata, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan, partisipasi, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat berlangsung dalam konteks lokal yang spesifik [3]. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan analisis pada Dusun Tuing sebagai ruang sosial-budaya yang unik, sekaligus mengisi celah penelitian terkait integrasi kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekowisata [4].

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat diterapkan melalui pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Dusun Tuing. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan di Dusun Tuing, Desa Mapur, Kabupaten Bangka?

LANDASAN TEORI

Konsep Pemberdayaan Masayarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta kontrol masyarakat atas keputusan publik dan kehidupannya sendiri, sehingga tercipta kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mandiri [5].

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan [6].

pemberdayaan masyarakat dari suatu perspektif pluralis, pemberdayaan adalah suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan menolong mereka untuk belajar menggunakan keterampilan-keterampilan dalam melobi, menggunakan media, melakukan aksi politik, memahami bagaimana 'memanfaatkan sistem' dan sebagainya [7].

Konsep Ekowisata

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi, dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan [8]. prinsip-prinsip ekowisata dibagi menjadi lima prinsip, yakni Nature base (berbasis pada alam), Ecologically sustainable (berkelanjutan secara ekologis), Environmentally educative (pendidikan tentang lingkungan), Locally beneficial (manfaat bagi masyarakat lokal), dan Generate tourist satisfaction (menghasilkan kepuasan wisatawan).

Ekowisata saat ini merupakan hal yang dapat dipandang sebagai kendaraan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi alam menjadi kegiatan yang dapat menguntungkan bagi masyarakat lokal, alam, dan peserta wisata tersebut. Seperti halnya pada Dusun Tuing yang mengembangkan ekowisata pulau punggur sebagai pemberdayaan masyarakat dan memberikan edukasi berupa pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat maupun peserta wisata.

State Of The Art

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang menunjukan beragam temuan hasil penelitian tentang pemberdayaan masyarakat mulai dari proses, hambatan dan tantangan dalam proses pemeberdayaan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa Kearifan lokal, seperti semangat gotong royong dan pelestarian budaya, memegang peranan penting dalam pengelolaan ekowisata. Masyarakat berperan aktif melalui lembaga seperti LPHD dan POKDARWIS, terlibat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan [9] [10] [11]. Hasilnya menunjukkan bahwa selain masyarakat memiliki peran yang sangat penting namun peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang ekowisata juga sangat penting sebagai daya tarik wisatawan. Sejalan dengan penelitian tersebut terdapat penelitian mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ditemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan [12].

Penelitian selanjutnya juga menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan ekowisata untuk mencapai keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai budaya lokal tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan tetapi juga memberdayakan komunitas setempat secara sosial dan ekonomi [13] [14]. Sejalan dengan penelitian hasil penelitian mengidentifikasi strategi optimalisasi ekowisata yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasilnya menunjukkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata serta dampak positif terhadap ekonomi lokal [15] [16]. Hasil penelitian selanjutnya menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kawasan ekowisata untuk mencapai keberlanjutan sosial dan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas secara langsung berkontribusi pada keberhasilan program ekowisata [17].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara deskriptif, dalam konteks alamiah [18]. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam indentifikasi konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Dusun Tuing Desa Mapur. Sumber Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh adat mapur, Masyarakat Desa setempat, dan Komunitas Masyarakat nelayan punggur. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan pemerintah, studi sebelumnya, mengenai pemebrdayaan masyarakat dibidang pariwisata. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Dusun Tuing dengan menggunakan *Community Empowerment Framework* (Scheyvens, 1999) yang dipadukan dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dan dimensi psikososial pemberdayaan dari Rappaport (1987) [19][20]. Kombinasi kerangka ini relevan dengan karakter Dusun Tuing sebagai komunitas pesisir yang memiliki kekuatan aset alam dan budaya, tetapi masih menghadapi keterbatasan struktural dalam pengelolaan ekowisata.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan analisis pemberdayaan dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu akses terhadap sumber daya**,** partisipasi dalam pengambilan keputusan**,** kontrol terhadap manfaat, dan perasaan berdaya. Keempat dimensi ini menjadi pisau analisis untuk menilai sejauh mana masyarakat Dusun Tuing mampu memobilisasi aset lokal dan kearifan budaya, khususnya nilai-nilai Suku Lom, dalam mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Berdasarkan kerangka tersebut, pembahasan selanjutnya menguraikan temuan penelitian secara sistematis pada setiap dimensi pemberdayaan guna menunjukkan keterkaitan

antara landasan teoretis dan dinamika empiris pemberdayaan masyarakat di Dusun Tuing.

Akses Sumber Daya

Aspek akses sumber daya dalam pemberdayaan ekowisata berbasis kearifan lokal merujuk pada kemampuan masyarakat setempat untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, serta sosial secara berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Akses yang adil terhadap sumber daya ini merupakan fondasi penting agar komunitas lokal dapat berperan aktif sebagai subjek pengelola ekowisata, bukan sekadar objek yang dieksploitasi. Dalam hal kearifan lokal, pengetahuan tradisional tentang pengelolaan lingkungan sering kali menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mendukung pengembangan wisata yang ramah lingkungan. Pemberdayaan menjadi efektif ketika masyarakat memiliki hak kelola, dukungan infrastruktur, akses terhadap pasar, serta kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola potensi wilayah mereka secara mandiri dan lestari. Berikut ini gambar potensi eko wisata pulau punggur;



Gambar 1. Keindahan Potensi Eko Wisata Pulau Punggur Dusun Tuing

Gambar diatas menyuguh keindahan Eko Wisata Pulau Punggur. Selain memiliki k pantai dikawasan yang indah Kawasan ini juga memiliki alam bukit dan juga pulau yang didalamnya menyimpan kekayaan alam yang beragam mulai dari habitat hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat dusun tuing khususnya Kelompok Tani Hutan Memilki bertanggung jawab dengan tujuan melestarikan lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, serta memberikan pengalaman edukasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui wawancara, observ asi serta dokumnetasi ditemuakan bahwa pada aspek suberdaya yang mencakup akses sunber daya ekonomi, akses pengetahuan dan juga akses jaringan) bahwa masyarakat Dusun tuing Desa Mapur sejauh ini mayoritas penduduk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari pekerjaan sebagai nelayan, hamper 90% masyarakat bekerja sebagai nelayan. Namun saat ini masyarakat mulai menyadari bahwa ada potensi lain yang dapat di kembangkan oleh masyarakat dusun tuing yaitu eko wisata karena dusun tiung

ini selian kaya dengan ikan di laut juga memiliki keindahan pantai yang sangat indah dipadukan dengan alam dan hutan yang masih sangat asri. Sehingga kemudian masyarakat dusun tuing Desa Mapur membentuk Kelompok Tani Hutan(KTH) Pulau Punggur. Tujuannya adalah untuk bisa mengelola Kawasan hutan secara legal. Setelah menumpuh jalur yang Panjang Pada tahun 2022 Kelompok Tani Hutan Pulah Punggur mendapatkan pesetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI No. SK.283/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2022 tentang pemberian persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan pulau punggur seluas kurang lebih 18 Ha pada Kawasan hutan lindung di Desa Mapur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

Kelompok Tani Hutan Pulau Punggur saat ini beranggotakan 22 orang. Melalui kelompok tani hutan inilah kemudian mulai membangun dan mengembangkan ekowisata pulau punggur. Namun sampai saat ini yang masih menjadi masalah utama adalah terkait pendanaan. Selama ini KTH mendapatkan dana dengan cara bermitra dengan salah seorang investor yang juga merupakan anggota KTH tersebut. Namun saat ini pembangunan ekowisata pulau punggur jauh dari kata maksimal diakibatkan macetnya dana yang bersumber dari investor tersebut, karena sejauh ini belum ada bantuan dana yang besumber dari pemerintah jadi masih mengandalan pihak investor. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak Wili Kristianto selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Pulau Punggur yang menjelakan bahwa;

> "Sejauh ini belum ada dana bantuan dari pemerintah, tapi memang sebetulnya sudah ada sinyal dari pemerintah bahwa bisa dilakukan pengajuan dana kepada pemerintah, namun permasalahannya adalah kita masih ada kesepekatan dengan investor yang awal. Jadi belum ada pemutusan kesepakatan pengalihan sumber pendanaan. Jadi kita harus pemutusan kesepakatan dengan investor awal baru kita lakukan pengalihan sumber dana misalnya dari pemerintah tadi. Jadi sampai saat ini belum ada komunikasi dengan pihak investor dan belum ada keputusan apakah dilanjutkan atau diputus, jadi masih terkendala itu"

Hingga saat ini, belum ada dana bantuan dari pemerintah yang diterima karena masih terdapat kesepakatan aktif dengan investor awal. Meskipun ada sinyal positif bahwa pengajuan dana ke pemerintah dimungkinkan, pengalihan sumber pendanaan tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya pemutusan kesepakatan secara resmi dengan investor sebelumnya. Karena hingga kini belum ada komunikasi maupun keputusan terkait kelanjutan atau pemutusan kerja sama dengan investor, proses pengalihan dana menjadi kendala. Terkait askses pengetahuan atau keterampilan brdsarkan temuan penelitian bahwa sejauh ini anggota kelompok tani hutan baru sekali mendapatkan pelatihan pengeolaan eko wisata yaitu pada tahun 2023 selama 3 hari yang diselenggrakan oleh pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh informan yaitu bapak Rio selaku sekertaris Desa Mapur yang menjelaskan bahawa;

> "Sejauh ini terkait pelatihan kalu dikatakan sering sebetulnya tidak juga. Tapi pernah pada tahun 2023 pemerintah melalui dinas pariwisata mengadakan pelatihan selama 3 hari terkait pengelolaan ekowisata yang diadakan di hotel tanjong pesona. Dan kita ikut sertakan anggota kelompok tani hutan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Untuk kemitraan sendiri memnag belum maksimal karena sejauh ini baru bermintra dengan investor dan juga bubus panca yang mendukung penuh dalam hal administrasi perizinan ke kementrian"

Pelatihan pengelolaan ekowisata yang dilaksankan belum secara maksimal karena frekuensinya belum rutin atau berkelanjutan.selain itu terkait dengan kemitraan juga belum optimal, hanya terbatas pada kerja sama dengan investor dan Bubus Panca yang membantu dalam proses administrasi dan perizinan ke kementerian.

Maka pengembangan ekowisata masih terkendala akses sumber daya ekonomi, terutama ketergantungan pada satu investor yang pendanaannya macet, sementara bantuan dari pemerintah belum dapat diperoleh karena belum adanya pemutusan kesepakatan dengan investor awal. Akses pengetahuan juga terbatas karena pelatihan pengelolaan ekowisata hanya sekali dilaksanakan pada 2023, dan kemitraan masih minim, hanya melibatkan investor serta BUMDes Panca dalam proses perizinan, sehingga pemberdayaan ekowisata belum maksimal dan memerlukan penguatan pendanaan, pelatihan berkelanjutan, serta perluasan jaringan kemitraan yang lebih inklusif

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam pemberdayaan ekowisata berbasis kearifan lokal, karena keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif, kesadaran kolektif, dan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi partisipasi terlihat melalui inisiatif masyarakat dalam membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulau Punggur sebagai wadah kolektif untuk mengelola hutan secara legal dan mengembangkan ekowisata. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada aspek pengambilan keputusan, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan seperti pengelolaan kawasan, penerimaan anggota, serta pelibatan dalam pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Partisipasi yang muncul dari bawah (*bottom-up*) ini mencerminkan penguatan modal sosial dan rasa memiliki terhadap sumber daya lokal, yang pada gilirannya mendorong pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan. Seperti yang disampaikan oleh informan yaitu bapak Wili Kristianto selaku Ketua KTH menjelaskan bahwa;

> "Untuk meningkatkan pastisipasi aktif masyarakat terutama anggota kelompok, kami sering mengadakan musywawarah untuk mengakomodir pendapat-pedapat masyarakat terutama kelompok anggota terkait pengelolaan eko wisata pulau punggur, selain itu kita juga melibatkan pemerintahan desa, pemuda, tokok adat dan ibu-ibu PKK. Namun memang sapai saat ini belum ada usulan terkait rencana aturan seperti tarif masuk, batas pengunjung dll"

Masyarakat Dusun Tuing telah menunjukkan upaya yang baik dalam meningkatkan partisipasi aktif melalui musyawarah yang melibatkan anggota kelompok, pemerintah desa, pemuda, tokoh adat, dan ibu-ibu PKK dalam pengelolaan ekowisata Pulau Punggur. Pihak Pengelola juga dalam hal ini KTH sangat memberikan ruang terbuka kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bentuk pemikiran atau ide maupun materi. Namun, meski partisipasi dalam forum terjalin secara inklusif, hingga saat ini belum ada kesepakatan formal atau usulan konkret mengenai aturan pengelolaan seperti tarif masuk, pembatasan jumlah pengunjung, atau aturan-aturan operasional lainnya, sehingga sistem pengelolaan kolektif masih dalam tahap awal dan belum menghasilkan kebijakan teknis yang mengikat.

Kontrol dan Distribusi Manfaat

Aspek kontrol dan distribusi manfaat menjadi indikator krusial dalam menilai tingkat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui, wawancara, obeservasi dan dokumentasi Di Dusun Tuing, Desa Mapur, menunjukan hawa meskipun telah terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulau Punggur sebagai lembaga pengelola, penerapan kontrol kolektif terhadap pengelolaan sumber daya masih terbatas, terutama dalam hal penetapan aturan pengunjung, tarif masuk, dan alokasi hasil pendapatan. Musyawarah memang rutin dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat, termasuk peran aktif pemerintah desa, pemuda, tokoh adat, dan ibu-ibu PKK, namun hingga kini belum lahir kebijakan teknis yang mengikat terkait tata kelola atau mekanisme distribusi pendapatan ekowisata. Akibatnya, meskipun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan cukup inklusif, kontrol formal dan transparansi dalam pengelolaan belum sepenuhnya terbangun.

Selain itu, karena belum adanya aktivitas ekowisata yang berjalan secara operasional (akibat terbatasnya pendanaan), distribusi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat masih belum terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan belum mencapai tahap penguasaan penuh oleh masyarakat atas aset dan hasil ekowisata, sehingga perlu didukung dengan pembentukan aturan bersama, sistem akuntabilitas transparan, dan skema bagi hasil yang adil untuk memastikan bahwa manfaat dari ekowisata benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota komunitas secara merata dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan yaitu bapak Rio Selaku Sekertaris Desa Mapur yang menjelaskan bahwa:

> "Sejauh ini belum kalau untuk perencanaan atau pemetaan tentang manfaat bagi hasil dari pendapatan belum ada, namun kalau untuk aktivitas kegiatan kita pengelola di ekowisata pulau punggur sudah ada yang dalam ADRT dibuat oleh pihak konsulatan tapi memang pelaksannanya belum dilaksanakan. Sebetuilnya secara aturan kita sudah resmi artinya kami sudah bisa menerapkan dan menetapkan tarif masuk, sewa saung dll. Kami belum berani karena memang fasilitas nya belum mendukung. Sehingga memang dari pengelolaan ekowisata ini belum mendatangkan hasil yang siginifikan sehingga kita belum bisa memetakan presentase dan pos-pos yang bisa meneripa manfaanya. Sehingga belum terlihat hasilnya"

Dari pernytaan tersebut dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada perencanaan atau pemetaan distribusi manfaat dari pendapatan ekowisata Pulau Punggur karena kegiatan ekowisata belum berjalan secara operasional, meskipun secara hukum pengelola sudah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif masuk, sewa saung, dan objek pendapatan lainnya. Kelengkapan administratif seperti AD/ART yang dibuat oleh konsultan sudah tersedia, tetapi pelaksanaan aktivitas ekowisata tertunda karena dana yang belum memadai. Akibatnya, belum ada pendapatan yang dihasilkan, sehingga pembagian manfaat, presentase bagi hasil, dan pos-pos penerima manfaat belum bisa ditentukan. Dengan kata lain, meskipun dasar legal untuk pengelolaan dan pungutan resmi sudah ada, realisasi ekonomi dan distribusi manfaat bagi masyarakat masih belum ada karena keterbatasan infrastruktur dan operasional ekowisata berjalan secara maksimal.

Rasa Berdaya

Rasa berdaya atau agency merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan komunitas, karena menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bertindak secara mandiri, membuat keputusan strategis, dan mengambil inisiatif dalam mengubah kondisi kehidupan mereka. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, oservasi dan

dokumentasi menunjukan bahwa di Dusun Tuing, Desa Mapur, agency masyarakat mulai terlihat melalui kesadaran kolektif akan potensi ekowisata yang dimiliki, yang kemudian menggerakkan mereka untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulau Punggur dan secara aktif mengajukan hak pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berhasil diperoleh pada 2022. Langkah ini mencerminkan kemandirian dan keberanian masyarakat untuk bergerak keluar dari ketergantungan pada sektor perikanan semata. Upaya musyawarah rutin, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, serta kesiapan untuk menetapkan aturan pengelolaan meskipun belum dilaksanakan, menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki visi dan otoritas moral dalam pengelolaan sumber daya lokal. Namun, rasa berdaya tersebut masih dibatasi oleh kondisi struktural seperti ketergantungan pada satu sumber pendanaan, minimnya bantuan pemerintah, dan keterbatasan infrastruktur, yang membuat eksekusi atas keputusan kolektif terhambat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan yaitu bapak Wili Kristianto selaku Ketua KTH Pulau Punggur yang menjelaskan bahwa;

> "Dengan adanya Program ini sebetulanya menjadi harapan baru bagi masyarakat khususnya Dusun tuing Desa Mapur. Artinya masyarakat menginginkan kemandirian ekonomi menuju Desa yang maju dan sejahtera. Dengan adanya program ini masyarakat ingin mencoba keluar dari zona nyaman yang mana selama ini masyarakat hanya mendapatkan pengahasilan dari nelayan. Harapanya dengan adanya pemebrdayaan ini masyarakat bisa mendapatkan peningkatan dari segi ekonomi karena kalo program ini berhasil masyarakat juga bisa berjualan dll. Jadi meskipun nantinya ada perubahan atuaran kebijakan kami sebagai masyarakat tentu akan mempertahankan program ini"

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa Masyarakat Dusun Tuing memandang program pemberdayaan ekowisata sebagai harapan baru untuk keluar dari ketergantungan ekonomi sebagai nelayan dan mencapai kemandirian serta kesejahteraan. Adanya program ini memicu keinginan untuk beralih dari zona nyaman ekonomi tradisional menuju diversifikasi pendapatan melalui kegiatan ekowisata, seperti berjualan atau membuka usaha pendukung. Masyarakat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan program ini meskipun jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan dimasa depan, yang menunjukkan tekad kolektif dalam menjaga keberlanjutan inisiatif pemberdayaan dan keyakinan bahwa keberhasilan ekowisata dapat membawa peningkatan ekonomi dan kemajuan desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, adanya inisiatif mandiri, kesadaran hukum, dan upaya kolaboratif menegaskan bahwa agency masyarakat Dusun Tuing telah terbangun secara substantif, dan hanya memerlukan dukungan eksternal yang tepat untuk berkembang menjadi kemandirian penuh dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap aspek agency dalam pemberdayaan ekowisata di Dusun Tuing, Desa Mapur, temuan ini sangat relevan dengan teori *community based natural resource management* (CBNRM) dan *empowerment theory*, khususnya pendekatan "Relational Agency" yang dikembangkan oleh Cleaver (2012). Teori ini menekankan bahwa kemampuan masyarakat untuk bertindak (*agency*) bukan hanya merupakan hasil dari kemauan individu, tetapi terbentuk melalui relasi sosial, struktur kelembagaan, akses terhadap sumber daya, dan lingkungan kebijakan [21]. Dusun Tuing, terbukti bahwa masyarakat telah membangun relational agency melalui pembentukan KTH, musyawarah inklusif, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat meskipun dibatasi oleh ketergantungan pada satu sumber dana dan

kurangnya infrastruktur. Temuan ini juga selaras dengan teori *adaptive co-management* (ACM) Armitage et al., dan Olsson et al. yang menekankan pentingnya pembelajaran kolektif, fleksibilitas kelembagaan, dan keterlibatan multi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. [22]. Masyarakat Dusun Tuing menunjukkan potensi sebagai *co-managers* yang aktif, meskipun belum sepenuhnya berada dalam struktur pengelolaan yang formal dan mandiri. Komitmen mereka untuk mempertahankan program ekowisata di tengah potensi perubahan kebijakan mencerminkan *adaptive capacity* kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan dalam ketidakpastian institusional.

Selanjutnya temuan penelitian juga selaras denga penelitian yang dilakukan oleh Borrini-Feyerabend & Hill tentang *diversity of values in nature-based* bahwa ekowisata berbasis kearifan lokal bukan hanya solusi ekologis, tetapi juga proyek emansipasi social di mana masyarakat merebut kembali hak, ruang, dan kontrol atas sumber daya mereka.[23]. Dalam hal ini, keinginan masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada sektor perikanan semata mencerminkan transisi dari *livelihood dependency ke empowered agency*. Dengan demikian, dinamika di Dusun Tuing dapat dipahami sebagai kasus emergent agency yaitu bentuk pemberdayaan yang sedang berkembang, yang didorong oleh harapan kolektif, kesadaran hukum, dan dorongan eksternal, tetapi yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, transparansi, dan dukungan infrastruktur untuk mencapai tahap transformasi penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan ekowisata di Dusun Tuing telah menunjukkan langkah awal yang positif melalui inisiatif masyarakat dalam membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Pulau Punggur sebagai lembaga pengelola kawasan hutan secara legal. Masyarakat menunjukkan partisipasi aktif dan rasa berdaya (agency) yang cukup kuat dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah, dan keterlibatan lintas kelompok sosial seperti pemuda, tokoh adat, dan PKK. Namun, pemberdayaan tersebut masih menghadapi tantangan strategis terutama dalam aspek akses sumber daya, di mana ketergantungan terhadap satu investor menyebabkan hambatan signifikan akibat macetnya pendanaan, sementara bantuan pemerintah belum dapat diakses karena belum adanya pemutusan kesepakatan dengan investor sebelumnya. Selain itu, akses pengetahuan masih terbatas dengan hanya satu kali pelatihan yang diberikan, dan kemitraan yang terbangun belum inklusif. Dalam aspek kontrol dan distribusi manfaat, belum terbentuk aturan teknis yang mengikat terkait tarif, pembatasan pengunjung, dan mekanisme pembagian pendapatan, sehingga sistem tata kelola belum transparan dan formal. Karena kegiatan ekowisata belum beroperasi penuh, distribusi manfaat ekonomi belum terwujud secara nyata. Secara keseluruhan, meskipun agency masyarakat telah terbangun, pemberdayaan ekowisata di Dusun Tuing masih dalam tahap awal dan memerlukan penguatan struktural melalui dukungan pendanaan berkelanjutan, pelatihan rutin, perluasan kemitraan, dan pembentukan regulasi internal yang transparan untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan ekowisata berbasis kearifan lokal.

DAFTAR REFERENSI

[1] Mutiah Sahiddin, "Pesisir Tuing Miliki Potensi Ekowisata Menarik," 2022.

[2] T. Pathony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang," *Int. J. Demos*, vol. 1, no. 2, pp. 262–289, 2019.

[3] A. D. Suganda, "Konsep Wisata Berbasis Masyarakat," *I-ECONOMICS A Res. J. Islam. Econ.*, vol. 4, no. 1, pp. 29–41, 2018.

[4] A. Haris, "Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat," *Jupiter*, vol. 13, no. 2, 2014.

[5] Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada., 2003.

[6] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Bandung: PT. Refika Pratama., 2006.

[7] J. dan F. T. Ife, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi.* Yogyakarta: Pustaka pelajar., 2008.

[8] I. Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan.* Yogyakarta: : Pustaka Pelajar., 2015.

[9] T. Noerasto, A. D. Larantika, I. M. Mardika, N. Luh, and S. Adnyani, "Local Wisdom-Based Ecotourism Development Model In Sambangan Village , Sukasada District , Buleleng Regency Bali province," vol. 04, no. 04, pp. 459–470.

[10] E. Andriana, R. Yuliana, W. Ilmiah, C. Aulina, T. E. Noviyanti, and S. Ramadayanti, "Pemberdayaan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal," *J. Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 52–60, 2022, doi: 10.46843/jmp.v1i2.267.

[11] N. L. Y. Dewi, B. Supriyono, A. F. Wijaya, and S. Rochmah, "Local Wisdom-Based Sustainable Tourism Village Development Collaboration in Badung Regency," *Int. J. Sci. Soc.*, vol. 5, no. 3, pp. 134–143, 2023, doi: 10.54783/ijsoc.v5i3.724.

[12] C. Prasetya and S. D. Harahap, "Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah," vol. 6, no. 4, pp. 956–963, 2024, doi: 10.37034/infeb.v6i4.1036.

[13] M. A. Lasaiba, "Integrasi Kearifan Lokal dalam Ekowisata Berkelanjutan dari Perspektif Masyarakat Adat," *J. Jendela Pengetah.*, vol. 15, No. 1, no. April, pp. 1–14, 2022.

[14] M. Sukereni, "Development of Eco-tourism with Cultural Insights and Local Wisdom for Community," *Proc. 3rd Int. Conf. Bus. Law Local Wisdom Tour. (ICBLT 2022)*, vol. 721, p. 165, 2023.

[15] R. Ayustia and J. P. Nadapdap, "Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Peningkatan Pendapatan Perempuan Di Daerah Perbatasan," *EKOMBIS Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 481–494, 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i1.3184.

[16] I. D. M. Suartha, "Participatory Communication Model Based on Local Wisdom in Ecotourism of West Detusoko Village," *urnal Komun. Ikat. Sarj. Komun. Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 13–21, 2021.

[17] C. S. Maak, M. P. L. Muga, and N. T. Kiak, "Strategi pengembangan ekowisata terhadap ekonomi lokal pada Desa Wisata Fatumnasi," *OECONOMICUS J. Econ.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–115, 2022.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.,

2022.
[19] R. Scheyvens, "Ecotourism and the empowerment of local communities," *Tour. Manag.*, vol. 20, no. 2, pp. 245–249, 1999.
[20] C. Venter, "An asset-based community development initiative for HIV and AIDS survivors." 2010.
[21] F. Cleaver, "'Deconstructing Productive Hybrids: Re-thinking Institutions, Power and Agency in Natural Resource Management.,'" *Environ. Plan. A Econ. Space,* vol. 44, no. 1, 2012, doi: doi.org/10.1068/a4486.
[22] R. Plummer, D. R. Armitage, and R. C. De Loë, "Adaptive comanagement and its relationship to environmental governance," *Ecol. Soc.*, vol. 18, no. 1, 2013.
[23] J. M. Foggin, D. Brombal, and A. Razmkhah, "Thinking like a mountain: Exploring the potential of relational approaches for transformative nature conservation," *Sustainability*, vol. 13, no. 22, p. 12884, 2021.